

Kelola Keuangan Masih Buruk

PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar mencatat ribuan temuan dari audit seluruh Pemda se-Kalbar sejak tahun 2004. Banyaknya temuan itu menandakan masih buruknya pengelolaan keuangan pemerintah di daerah ini.

"Unsur yang pertama adalah SDM (Sumber Daya Manusia)," tegas Hernold Ferry Makawimbang, Kepala Sub Auditoriat Kalbar I BPK Perwakilan Kalbar kepada wartawan disela menjadi pemateri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (3/3).

BPK Perwakilan Kalbar menilai, masih banyaknya temuan dalam pemeriksaan keuangan Pemda disebabkan banyak unsur dalam pengelolaan keuangan yang belum sempurna. Unsur-unsur ini lah yang harus segera diperbaiki pemerintah demi mencegah terulangnya temuan dan meningkatkan predikat hasil pemeriksaan keuangan.

Dalam mengelola keuangan, SDM yang mengelolanya tidak bisa serampangan. Setiap unit kerja yang mengelola keuangan pemerintah harus memi-



Hernold Ferry Makawimbang. ARDU SYUKRI

Tiga Faktor Mempengaruhi Temuan BPK

1. SDM pengelola akuntansi yang minim
2. Sistem pengelolaan keuangan kurang disusun baik
3. Pengawasan internal kurang optimal

Kelola Keuangan

..... dari halaman 1

liki SDM yang mengerti tentang akuntansi atau akuntan.

Untuk mengatasi hal ini, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah. Di Kalbar kan ada Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Pemerintah bisa menyekolahkan tenaga akuntansinya di sana, saran Hernold. Unsur kedua yang bisa mempengaruhi sedikit banyaknya temuan dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah sistem yang berlaku di setiap unit kerja. Sistem keuangan di setiap unit kerja harus disusun dengan baik, ucapnya. Unsur lainnya yang juga bisa memengaruhi temuan adalah proses pengelolaan keuangan. Proses ini menyangkut soal pengawasan oleh pengawas internal, termasuk inspektorat. Monitoring pengelolaan keuangan harus optimal, tukas Hernold.

Seperti diberitakan Equator, BPK Perwakilan Kalbar mencatat selama 2004 hingga

semester II 2010 terdapat 2144 temuan dalam proses penggunaan keuangan seluruh pemerintah daerah se-Kalbar. Terhadap temuan itu, BPK membuat dan 4313 rekomendasi.

Dari total rekomendasi BPK itu, 15 entitas (sasaran audit) di Kalbar yang mencakup 14 kabupaten/kota dan Pemprov baru menindaklanjuti sekitar 50 persen rekomendasi. Sisanya ada yang masih dalam proses tindak lanjut, dan ada juga yang belum ditindaklanjuti sama sekali. Dari 14 kabupaten/kota plus pemerintah provinsi, BPK mencatat tiga pemerintah daerah yang menempati urutan teratas melaksanakan tindak lanjut. Mereka adalah Pemkab Sambas dengan ranking 83 persen, Pemkab Landak 74 persen dan Pemkot Singkawang 73 persen. Soal kekurangan tenaga akuntansi juga diakui Kepala Inspektorat Kalbar, Drs John Itang

MM. Di inspektorat, kita juga masih kekurangan tenaga, kata John kepada sejumlah wartawan, kemarin. Temuan dalam pemeriksaan keuangan oleh BPK, lanjut John, pasti akan selalu ada. Hal ini dilatarbelakangi keterkaitan dua arah. Tidak hanya dari Inspektorat. Masalah temuan ini dua arah. Dari pengelola dan dari Inspektorat, ujarnya. Khusus SDM auditor di lingkungan Inspektorat Kalbar, jumlahnya hanya sebanyak 64 orang. Sedangkan jumlah ideal yang dibutuhkan, menurut John Itang, sekitar 100 orang.

Untuk mengatasi kekurangan ini, John mengaku menggalakan pelatihan atau kursus singkat untuk meningkatkan kompetensi stafnya dalam mengaudit. Cara yang dilakukan melalui diklat atau pelatihan-pelatihan keuangan. Untuk tahun 2010, ada 20 orang yang dilatih, pungkash John. (bdu)